

**IMPLEMENTASI DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA SIMPANAN  
MUDHARABAH DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH SURABAYA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**DWIPA AIRLANGGA**  
**2012310065**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**  
**S U R A B A Y A**  
**2 0 1 6**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwipa Airlangga  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Agustus 1993  
N.I.M : 2012310065  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konstrasi : Akuntansi Perbankan  
Judul : Implementasi Dan Perlakuan Akuntansi Pada  
Simpanan Mudharabah Di KSPPS BMT Amanah  
Ummah Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

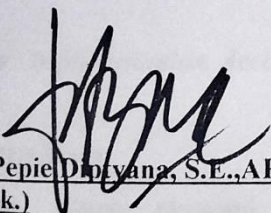
Dosen Pembimbing,

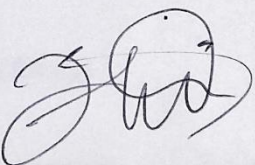
Co. Dosen

Pembimbing,

Tanggal : .....

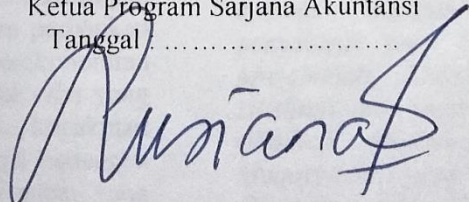
Tanggal :

  
(Pepie Daryana, S.E., AK. MSi.)  
Ak.)

  
(Indah Hapsari, S.Ak., M.A.,  
Ak.)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal : .....

  
(Dr. Luciana Spica Almillia S.E., M.Si., QIA (CPSAK))

# IMPLEMENTASI DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA SIMPANAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH SURABAYA

Dwipa Airlangga  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [dwipa794@gmail.com](mailto:dwipa794@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to look at conditions in the real situation regarding implementation of the Akad mudharabah saving and how the accounting treatment of the mudharabah savings based on the statement of financial accounting standards (PSAK) No. 105. This research was conducted in KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. This research is qualitative research using the case study method. The results of this research it can be concluded that the overall implementation of mudharabah deposits mudharabah on contract is in compliance with the provisions of Sharia law but for the accounting treatment are still not in accordance with PSAK No. 105 related to the recognition, representation, and such disclosure. It is based on the findings of researchers on mudharabah savings on cooperatives there are two types of savings, that is savings for cooperative membership saving principal and compulsory savings mudharabah savings is recognized as a long-term and served or disclosed as capital of the cooperative, and for savings mudharabah mutlaqah and muqayyadah recognized as the mudharabah savings short term and medium and is served or disclosed as short-term and medium duty. This is not in accordance with statement of PSAK No. 105 for savings mudharabah must be recognized and disclosed as temporary syirkah funds, presented of value are recorded based on each type of mudharabah. Temporary syirkah funds should be presented separately from the post liability and equity and formed its own post as temporary syirkah funds heading on the balance sheet side passiva, this is based on the provisions of PSAK No. 101 on the presentation of the financial statements.*

**Key words :** Implementation, Accounting Treatment, Mudharabah Savings.

## PENDAHULUAN

Keberadaan sistem ekonomi syariah semakin berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan dunia perekonomian di Indonesia saat ini. Adanya pendapat bahwa sistem keuangan konvensional khususnya dalam perbankan yang telah mengakar dalam perekonomian masyarakat mengandung unsur *riba* yang bertentangan dengan suatu keyakinan agama, oleh sebab itu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang berbasis syariah selalu mengembangkan produk-produk syariahnya yang

diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat meminimalisasi keberadaan unsur *riba*.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya yaitu produk penyaluran dana (*Mudharabah, Ijarah, Murabahah, Musyarakah, salam, dan Istishna*) dan produk penghimpun dana (*Wadiah, Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah*) yang semua produk tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dari sekian macam produk syariah yang

ada pada lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, peneliti mencoba mengambil topik tentang produk penghimpun dana berupa simpanan mudharabah. Saat ini banyak masyarakat yang kelebihan dana akan menitipkan dana lebihnya kepada lembaga-lembaga keuangan konvensional terutama pada bank umum atau menginvestasikannya pada pasar saham. Tetapi ada juga masyarakat dengan pemikiran tertentu akan meletakkan dana lebihnya kepada lembaga keuangan berbasis syariah dengan harapan dana tersebut dapat lebih bermanfaat dan juga barokah karena tujuannya yang syariah. Simpanan mudharabah menjadi sebuah pilihan produk menarik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dari sekian banyak produk simpanan lain seperti tabungan dan deposito pada bank umum ataupun dirubah dalam bentuk investasi lainnya. Simpanan mudharabah adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-muthlaqah, yang dalam hal ini pihak *shahibul mall* (pemilik dana/nasabah) menitipkan dananya kepada pihak *mudharib* (pengelola dana/lembaga keuangan syariah) untuk dikelola dan dimanfaatkan dana tersebut untuk tujuan yang baik, halal, dan professional sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil dari pengelolaan dana oleh pihak lembaga keuangan syariah tersebut akan di *nisbahkan* sesuai dengan prosentase perjanjian pada waktu awal akad simpanan mudharabah dimulai.

Selain bank syariah yang sudah banyak tersebar dan menawarkan produk-produk syariah seperti simpanan mudharabah, berkembang juga lembaga keuangan non bank yang berorientasi pada usaha mikro masyarakat menengah kebawah yaitu koperasi syariah. Lembaga ini memiliki prinsip yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan berbentuk perbankan syariah umumnya. Perbedaannya, koperasi syariah dibawah naungan dinas koperasi sedangkan Bank Syariah tetap dibawah naungan Bank

Indonesia. Pada laporan akhir tahunnya juga terdapat perbedaan yang begitu mencolok dalam proses penyusunannya. Jika bank hanya melaporkan laporan keuangannya berdasarkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun dan bagi hasil yang dibagikan pada nasabahnya, sedangkan pada koperasi syariah harus dan wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan terlebih dahulu dengan mengundang para anggota koperasi syariah untuk dilibatkan haknya dalam bersuara atau menyatakan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil dalam proses penentuan pembagian sisa hasil usaha dan penetapan kebijakan-kebijakan tertentu sebelum proses penyusunan laporan keuangan tahunan.

Pada penelitian terdahulu seperti pada penelitian Suripto (2012) yang dilakukan pada tiga KJKS/BMT di Kabupaten Pematang, yaitu KJKS/BMT Artha Amanah, Al Fatah, dan El Ikhlas 338 dijelaskan atau disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada simpanan mudharabah khususnya simpanan berjangka mudharabah yang dilakukan ketiga KJKS/BMT tersebut masih belum sesuai dengan PSAK No. 105. Kesimpulan itu didapat Suripto dengan membandingkan pelaksanaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh ketiga KJKS/BMT tersebut dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud ingin mengetahui bagaimana implementasi, perlakuan akuntansi, pada simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya apakah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 dan ketentuan syariah yang berlaku serta bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga pada produk simpanan mudharabah dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No. 105 serta bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi keuangan KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya kedepannya

mengenai ketentuan bagi hasil pada simpanan mudharabah.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI**

### **Syariah**

*Syariah* merupakan istilah dari bahasa Arab yang secara harfiah memiliki arti “jalan” atau “jalan menuju tempat air”, “jalan yang jelas untuk diikuti” dan lebih tepat, “jalan yang mengarah ke sumber”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Syariah adalah jalan bagi yang beriman untuk mendapatkan bimbingan di dunia dan di akhirat.

Asyraf (2015 : 7-8) mendefinisikan syariah adalah “seperangkat norma, nilai, ataupun hukum yang mengatur cara hidup yang Islami yang mencakup aspek-aspek iman, ibadah, ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islami”. Ketika Syariah dikaitkan atau diaplikasikan dengan hal keuangan, Syariah selalu mempertimbangkan kaidah dan interpretasi dengan isu-isu keadilan sosial, kesetaraan, dan kepatutan, serta kepraktisan transaksi komersial. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan yang bersyariat Islam harus selalu memastikan bahwa semua kegiatan transaksi mereka harus sesuai dengan Syariah. Sistem keuangan berbasis Islami berpotensi untuk menjadi sebuah panutan yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan luhur Syariah. Perintah-perintah dalam Syariah ini menghubungkan transaksi keuangan dengan berbagai hal yang serius berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang adil, patut, dan transparan serta, untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

### **Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah sebuah badan usaha koperasi yang memiliki dan menerapkan aturan-aturan yang sama dengan koperasi umum. Hanya saja produk-produk yang ada di koperasi

umum nama dan sistemnya diganti dan disesuaikan dengan ketentuan syariah. Berdasarkan Permen/KUKM/nomor-16/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi disebutkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk juga untuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Nama-nama produk pada koperasi umum/konvensional akan berbeda/diganti pada koperasi syariah ini, seperti produk jual-beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama produk saja, sistem operasional yang digunakan juga berubah/berbeda dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Adapun tujuan dari koperasi syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut ikut membangun perekonomian bangsa yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan Islam.

### **Mudharabah**

Sjahdeini (2009) mendefinisikan akad mudharabah merupakan “Suatu transaksi berupa investasi berdasarkan pada kepercayaan”. Kepercayaan menjadi unsur yang paling utama dalam transaksi akad Mudharabah, yaitu pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk mengelola dananya. Akad mudharabah dalam bahasa Inggris disebut dengan *trust financing* karena unsur utamanya yang berupa kepercayaan. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Kepercayaan ini menjadi hal atau unsur penting dalam akad mudharabah



karena pemilik dana harus benar-benar percaya kepada pihak pengelola dana dan pihak pengelola dana juga harus benar-benar menjaga kepercayaan pihak pemilik dana dalam mengelola dana mudharabah tersebut. Dalam urusan pengelolaan dana seperti manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana mudharabah yang dilakukan oleh pihak pengelola dana tersebut, pemilik dana tidak diperkenankan untuk ikut campur, kecuali jika hanya sebatas melakukan pengawasan dan memberikan saran pada saat proses pengelolaan dana.

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yang memiliki arti bepergian, atau melakukan perjalanan untuk urusan dagang. Bisa disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena sang pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan agar memperoleh keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah kemitraan laba, dimana satu pihak berperan sebagai penyedia dana dan pihak yang lain menyediakan tenaga untuk bekerja. Jika dalam proses perjalanan pengelolaan atau penggunaan dana tersebut dapat menghasilkan laba, maka laba tersebut akan dibagi di antara mereka berdasarkan rasio yang sudah disepakati bersama di awal akad. Sedangkan jika terdapat kasus kerugian dalam pengelolaan dana tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh penyedia modal/dana dan pengelola dana akan kehilangan usahanya.

Untuk dapat melaksanakan akad mudharabah, tentu terdapat syarat atau rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad. Rukun akad mudharabah ada empat yaitu :

Untuk dapat melaksanakan akad mudharabah, tentu terdapat syarat atau rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad. Rukun akad mudharabah ada empat yaitu ; Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana), objek

mudharabah (modal dan kerja), *ijab kabul*/serah terima, *nisbah* keuntungan/bagi hasil

Pembagian hasil usaha mudharabah menurut PSAK No. 105 dapat dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan pada prinsip bagi hasil, maka pembagian hasil usaha akan didasarkan pada laba bruto/laba kotor (*gross profit*) bukan dari total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika pembagian hasil usaha didasarkan pada prinsip bagi laba, maka pembagian hasil usaha didasarkan pada laba bersih (net profit) yaitu laba kotor yang sudah dikurangi dengan biaya maupun beban yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah tersebut.

### **Mudharabah dalam PSAK 105**

Akad mudharabah dalam PSAK 105 didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang bisa disebut *shahibul maal* sebagai pihak yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua yang bisa disebut *mudharib* sebagai pihak yang mengelola dana, dan keuntungan yang terjadi atas pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara kedua pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak sedangkan kerugian financial yang terjadi dari proses pengelolaan dana tersebut hanya akan ditanggung oleh pemilik dana/*shaibul maal*. PSAK No. 105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian *nisbah* atau bagi hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian *nisbah*nya adalah laba bruto (*gross profit*) bukan dari total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan pada prinsip laba, maka dasar pembagian *nisbah*nya adalah laba *neto* (*non profit*) yaitu laba *bruto* dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana mudharabah. Kerugian akan ditanggung oleh pihak pemilik dana jika

kerugian tersebut bukan karena akibat dari kelalaian pihak pengelola dana. Dalam PSAK 105 paragraf 18 dijelaskan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana yaitu; tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari pihak yang berwenang.

Akad mudharabah dianggap sah dan mulai berjalan sejak dana atau modal usaha milik pihak pemilik dana diserahkan kepada pihak pengelola dana (PSAK 105 paragraf 16). Sedangkan untuk pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil ataupun secara total pada saat akad mudharabah berakhir sesuai kesepakatan yang disetujui bersama pihak pemilik dana dan pengelola dana.

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu ; mudharabah *mutlaqah*, mudharabah *muqayyadah*, mudharabah *musytarakah*

#### **Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Akad Mudharabah**

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bagi *shahibul maal*/pemilik dana, dana yang telah disalurkan akan diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran tunai/kas atau penyerahan aset nonkas kepada pihak *mudharib*/pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang diterima dalam akad mudharabah diakui sebagai dana *syirkah temporer* sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset jika yang diterima berupa aset nonkas. Setiap akhir periode akuntansi, dana *syirkah temporer* tersebut harus diukur sebesar nilai tercatatnya. Usaha mudharabah tersebut akan dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah telah diterima oleh pihak pengelola dana. Segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian

pengelola dana akan diakui sebagai beban bagi pengelola dana.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah pada saat proses pengelolaan dana telah dilakukan dapat diketahui dan dilihat secara jelas berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pihak pengelola dana. Tidak diperkenankan untuk mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana akan dibebankan pada pihak pengelola dana dan tidak akan mengurangi jumlah/nilai investasi mudharabah.

#### **Penyajian Mudharabah**

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, dalam menyajikan transaksi mudharabah ke dalam laporan keuangan di dalamnya harus berisi :

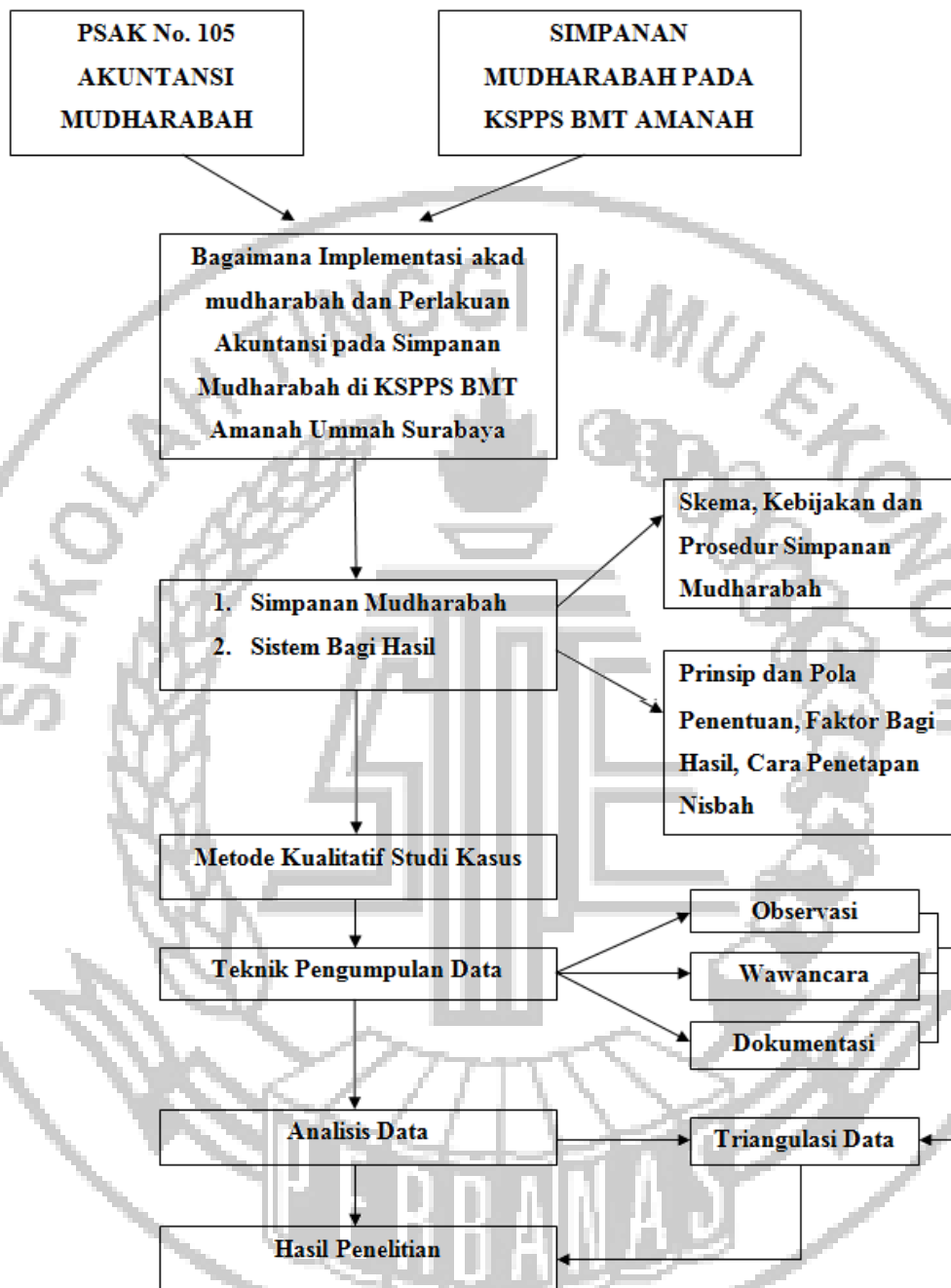
- a. Dana *syirkah temporer* dari pihak pemilik dana harus disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
- b. Bagi hasil dari pengelolaan dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pihak pemilik dana dicatat sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan pada sisi kewajiban.

#### **Pengungkapan Mudharabah**

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pengungkapan pengelolaan dana terhadap hal-hal terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b. Rincian dana *syirkah temporer* yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyaluran dana yang berdasarkan dari jenis mudharabah *muqayyadah* dan pengungkapan yang diperlukan harus sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

studi kasus berdasarkan tujuan penelitian. Yin (2009 : 1) menjelaskan mengenai studi kasus sebagai salah satu metode penelitian yang cocok jika pokok



pertanyaan suatu penelitian tersebut berkenaan dengan bagaimana dan kenapa. Terdapat komponen-komponen desain penelitian dalam penelitian studi kasus. Menurut Yin (2009 : 29) menjelaskan terdapat lima komponen desain penelitian tersebut adalah ; pertanyaan-pertanyaan penelitian, proposisi, unit-unit analisis, logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut, dan kriteria untuk menginterpretasikan temuan

### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana penerapan akuntansi pada simpanan mudharabah berdasarkan kondisi nyata dilapangan dengan berfokus pada satu subjek penelitian pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya terkait dengan bagaimana perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada simpanan mudharabah di koperasi tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

### **Unit Analisis Data**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pada simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya bagaimana penerapannya terkait dengan ketentuan PSAK No. 105.

### **Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan pihak terkait langsung mengenai simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. Data Sekunder merupakan data mengenai perusahaan berupa gambaran umum, data nasabah simpanan mudharabah, data laporan keuangan, dan kebijakan-kebijakan terkait dengan akuntansi pada simpanan

mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi menurut Yin (2009 : 112) adalah suatu kegiatan kunjungan lapangan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Observasi menjadi sumber bukti lain bagi suatu penelitian studi kasus dengan perannya yang memberikan informasi tambahan pada topik penelitian. Dalam metode ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada lembaga keuangan koperasi syariah yang diteliti, meliputi : lokasi lembaga, profil lembaga, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga dan data-data lainnya terkait dengan produk simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

Wawancara menurut Yin (2009 : 108) adalah sumber informasi yang esensial bagi studi kasus. Peneliti akan melakukan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dan lisan dengan sumber data. Peneliti akan melakukan tanya jawab sepihak secara langsung dengan Sekretaris Pengurus, Manajer Utama dan staff keuangan dan accounting koperasi untuk mencari informasi terkait praktik simpanan akad mudharabah dan bagaimana perlakuan akuntansinya. Peneliti juga menyertakan instrument pengumpul data berupa salinan hasil wawancara berisi daftar pertanyaan beserta jawaban dari informan disertai dengan dokumentasi berupa foto dan rekaman saat wawancara untuk mendukung kekuatan data yang diperoleh.

Peneliti juga akan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen pendukung dari subjek penelitian. dokumentasi menurut Yin (2009 : 103) adalah sumber data yang relevan untuk setiap topik studi kasus. Penggunaan dokumen dapat berfungsi sebagai penambah bukti dari sumber-sumber data utama yang lain,

dokumen juga akan membantu memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Jika data dari hasil wawancara kemudian bertentangan dengan dokumen yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan alasan untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan topik yang diteliti. Peneliti juga akan melakukan tinjauan kepustakaan dengan mengumpulkan beberapa literatur pendukung penelitian yang dapat berupa buku, jurnal maupun dari media elektronik internet berupa website.

### **Teknik Analisis Data**

Yin (2009 : 138) menjelaskan bahwa dalam menganalisis data pada penelitian studi kasus adalah dengan berdasarkan pada proposisi-proposisi teoritis dan lainnya dimulai dengan pendekatan deskriptif terhadap kasus topik yang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan melakukan survei langsung ke lapangan, melakukan wawancara dan kemudian mengumpulkan bukti-bukti dokumen yang berkaitan dengan simpanan mudharabah, sehingga peneliti dapat mengetahui kondisi secara nyata tentang perusahaan dan bagaimana penerapan akuntansi terkait simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya

Salah satu cara penting untuk membantu peneliti dalam menganalisis data adalah melakukan triangulasi sumber data (Bungin, 2007 : 264). Triangulasi sumber data dilakukan peneliti dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk simpanan mudharabah pada koperasi syariah KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.

Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data dari narasumber serta untuk menggambarkan bagaimana implementasi dan perlakuan akuntansi sistem bagi hasil pada penerapan akad mudharabah KSPPS BMT

Amanah Ummah Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu menjelaskan profil lembaga dan apa saja program atau produk yang ditawarkan KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya kepada nasabah atau anggotanya.
2. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad pada simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya, kemudian menjelaskan bagaimana prosedurnya serta penentuan persentase bagi hasil.
3. Menggambarkan bagaimana perlakuan akuntansi sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya meliputi :
  - a. Pengakuan dan pengukuran atas simpanan mudharabah.
  - b. Pengakuan pendapatan dan beban atas simpanan Mudharabah.
  - c. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.
4. Menggambarkan operasional KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dalam hal ini yang berkaitan dengan simpanan mudharabah apakah terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada pembiayaan Akad mudharabah dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Peneliti akan mencoba menjelaskan secara rinci asal-muasal transaksi mudharabah ini dari awal bagaimana transaksi itu dimulai hingga sampai timbul akad dan pembagian hasilnya pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengakuan**

Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya terdapat penyederhanaan mengenai pengakuan dan pencatatan akuntansi bagi simpanan. Koperasi mengakui simpanan keanggotaan koperasi

(simpanan pokok dan simpanan wajib) dan simpanan modal koperasi (simpanan modal penyertaan dan simpanan modal saham) sebagai simpanan mudharabah yang bersifat jangka panjang dan dicatat sebagai modal koperasi. Hal ini menjadi rancu karena simpanan keanggotaan koperasi dan simpanan modal koperasi adalah sesuatu hal yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi nomor 14 tahun 2015 untuk simpanan keanggotaan (simpanan pokok dan simpanan wajib) merupakan komponen ekuitas dalam laporan keuangan, sedangkan untuk simpanan modal koperasi (simpanan modal penyertaan dan modal saham) merupakan komponen kewajiban jangka panjang. KSPPS BMT Amanah Ummah mengakui simpanan keanggotaan dan simpanan modal koperasi sebagai simpanan mudharabah jangka panjang dan mencatatnya sebagai modal koperasi.

Pengakuan dan pencatatan simpanan keanggotaan dan simpanan modal koperasi ini juga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 karena jika kedua jenis simpanan tersebut memang diakui sebagai simpanan mudharabah seharusnya simpanan tersebut harus diakui sebagai dana syirkah temporer, tetapi bagi koperasi tidak diakui sebagai dana syirkah temporer melainkan sebagai modal koperasi. Untuk pengakuan dan pencatatan simpanan mudharabah harian (*mutlaqah* dan *muqayyadah*) juga tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 mengenai simpanan mudharabah harus diakui dan dicatat sebagai dana syirkah temporer, oleh koperasi simpanan mudharabah ini diakui sebagai Simpanan mudharabah jangka pendek dan menengah tetapi tidak dicatat sebagai dana syirkah temporer melainkan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan menengah. Menurut pendapat peneliti, simpanan mudharabah *mutlaqah* dan *muqayyadah* dicatat oleh KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya sebagai kewajiban jangka pendek dan menengah karena

mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi nomor 14 tahun 2015 hal 48 untuk simpanan mudharabah merupakan komponen kewajiban jangka pendek karena dananya dapat diambil oleh anggota sewaktu-waktu. Sedangkan pada PSAK No. 105 simpanan mudharabah harus diakui sebagai dana syirkah temporer karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana mudharabah tersebut jika terjadi kerugian (kecuali karena kelalaian pihak mudharib) dan dana syirkah temporer harus disajikan secara terpisah dari komponen kewajiban maupun ekuitas pada laporan keuangan syariah berdasarkan ketentuan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah untuk pos dana syirkah temporer harus disajikan terpisah dari pos kewajiban dan pos ekuitas di sisi passiva neraca. Hal ini menjadi penyebab pengakuan simpanan mudharabah bagi KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya tidak sesuai dengan PSAK No. 105 karena koperasi harus mengikuti Peraturan Menteri Koperasi nomor 14 tahun 2015 tersebut.

Untuk bagi hasil pada simpanan keanggotaan koperasi dan modal koperasi dihitung dan dibagikan setiap setahun sekali dan dihitung dari sisa hasil usaha setelah dikurangi beban pajak dan zakat, sedangkan untuk simpanan mudharabah *mutlaqah* dan *muqayyadah* akan dihitung dan dibagikan setiap bulan dan dihitung dari laba atau keuntungan bersih setiap bulan berjalan, didasarkan pada rata-rata mengendap pokok simpanan setiap bulannya. Hal ini menjelaskan bahwa koperasi telah menerapkan prinsip bagi hasil yang sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 bahwa pengakuan bagi hasil simpanan mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi hasil (*gross profit margin*) dan KSPPS BMT Amanah Ummah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip bagi laba (*profit sharing*) yaitu bagi hasil dari laba bersih setelah

dikurangi beban dan biaya pengelolaan dana.

### **Pengukuran**

Pengukuran simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. Berdasarkan PSAK No. 105 dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah akan diukur dan dicatat sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima dan pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya..

KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya mengukur simpanan mudharabah berdasarkan nilai kas yang disetorkan untuk setoran simpanan mudharabah tersebut. Jika setoran bukan berupa kas akan dihitung berdasarkan nilai dan harga pada waktu tersebut atau berdasarkan nilai wajarnya dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan.

### **Penyajian**

Penyajian simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah. PSAK No. 105 menjelaskan bahwa pencatatan dana simpanan mudharabah harus disajikan sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai tercatatnya pada laporan keuangan syariah, dan KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya menyajikan dana simpanan mudharabah anggota koperasi sebesar nilai yang disetorkan dan nilai tercatatnya pada pos kewajiban jangka pendek dan menengah dan ada yang dicatat sebagai modal koperasi.

Bagi hasil berdasarkan ketentuan PSAK No. 105 untuk penyajian bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di pos kewajiban. Sedangkan bagi hasil yang diberikan KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya kepada anggota koperasi

simpanan mudharabah langsung dikreditkan ke rekening anggota simpanan mudharabah setiap bulannya didasarkan pada perhitungan, porsi simpanan tercatat berdasarkan saldo mengendap pada rekening simpanan dan prosentase bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, karena KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya mengungkapkan simpanan mudharabah tidak sebagai dana syirkah temporer, yaitu mengakui dana simpanan keanggotaan dan simpanan modal koperasi sebagai simpanan mudharabah jangka panjang dan dicatat sebagai modal koperasi, simpanan mudharabah mutlaqah dan muqayyadah diakui sebagai simpanan mudharabah jangka pendek dan menengah dan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek dan menengah, sehingga pengungkapannya mengenai rincian dari simpanan mudharabah dan informasi lain yang diperlukan pada laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan pengakuan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data baik data primer maupun sekunder dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan perlakuan akuntansi untuk simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya masih belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105. Pengakuan, penyajian dan pengungkapan simpanan mudharabah pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya diakui dan diungkapkan sebagai kewajiban dan modal koperasi yang mana hal ini bertentangan dengan konsep yang

dijelaskan pada PSAK No, 105 mengenai dana simpanan mudharabah harus diakui, disajikan dan diungkapkan sebagai dana syirkah temporer, yaitu dana yang diakui sebagai bagian dari sisi passiva dalam neraca dan laporan keuangan syariah namun disajikan dan diungkapkan pada pos tersendiri sebagai pos dana syirkah temporer dan pos ini terpisah dari pos kewajiban dan ekuitas. Hal ini menjadi berpengaruh dan tidak sesuai pengungkapan dan penyajiannya dalam laporan keuangan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya mengakui dan mencatat simpanan keanggotaan dan simpanan modal penyertaan sebagai modal koperasi, sedangkan untuk simpanan mudharabah mutlaqah dan muqayyadah diakui sebagai simpanan mudharabah jangka pendek dan menengah dan mencatatnya sebagai kewajiban. Pengukuran simpanan mudharabah beserta bagi hasilnya pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105, yaitu diukur berdasarkan nilai kas yang disetorkan atau berdasarkan nilai tercatatnya untuk setoran dan dana pokok simpanan mudharabah yang mengendap tersebut. Jika setoran dan dana yang mengendap bukan berupa kas akan dihitung berdasarkan nilai dan harga pada waktu tersebut atau berdasarkan nilai wajarnya dan disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk penerapan bagi hasil pada simpanan mudharabah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105 yaitu, didasarkan pada prinsip bagi laba dan keuntungan bersih (*profit sharing*) dan porsi masing-masing simpanan anggota beserta prosentase yang sudah disepakati di awal akad oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidaksesuaian penerapan akuntansi pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dengan PSAK No. 105 menurut pendapat peneliti adalah disebabkan karena adanya kebijakan dan

peraturan dari Peraturan Menteri Koperasi nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang mewajibkan koperasi tersebut harus melaksanakan ketentuan dan Peraturan Menteri Koperasi tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan kedua narasumber ketika diwawancarai dan saling mengkonfirmasi antar keduanya beserta data dokumentasi pendukungnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menggali informasi dari pihak narasumber yang akan diwawancarai. Salah satu subjek wawancara yaitu bagian staff keuangan dan accounting koperasi tidak dapat diwawancarai karena sedang dalam masa cuti. Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah kurangnya informasi yang lebih akurat mengenai data bagi hasil akad mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya dikarenakan data tersebut dijalankan dalam sebuah sistem perangkat lunak. Sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat bagaimana prosedur yang sebenarnya dalam melakukan penentuan bagi hasil simpanan mudharabah pada koperasi tersebut. Narasumber hanya menjelaskan secara sederhana mengenai prosedur bagi hasil dan tidak bersedia memberikan data asli secara keseluruhan karena data yang dibutuhkan peneliti terkait data nasabah dan data bagi hasil simpanan mudharabah tersebut merupakan data primer koperasi yang harus dilindungi oleh entitas koperasi dan termasuk dalam kode etik kantor.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan untuk pihak KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya adalah hendaknya mengevaluasi perlakuan akuntansinya agar lebih menyesuaikan dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan terutama PSAK No. 105 mengenai pengakuan dan pengungkapan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan

penelitian sejenis dengan lebih matang dan sudah melakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak subjek penelitian yang dituju.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Abu : Cholid, Narbuko. (2005). "Metodologi Penelitian". Jakarta : Bumi Aksara.
- Ananda Rahman, Dimas. 2015. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif BMT PSU dan KANINDO)". Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ardiansyah, Dimas. 2013. "Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah (Studi Pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)". Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Sharsini. 2002. "Prosedur Penelitian". Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. "Penelitian Kualitatif". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hamidi. 2005. "Metode Penelitian Kualitatif". Malang : UMM Press.
- Huda, Nurul & Heykal, Mohamad. 2010. "Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Akuntansi mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi No. 105. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana
- Mawarid, Husnul. 2014. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak". Pontianak : Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Vol. 3, No. 2, Desember 2014 Hal. 27-42.
- Nurhayati, Sri & Wasilah (2013). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 /Per/M.KUKM/IX/2015 "Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi"
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 "Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi"
- Robert K. Yin. 2009. Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta : Rajawali Pers
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. "Research Methods for Business". United Kingdom : Jhon Wiley & Sons Ltd.
- Soemitra, Andri. 2009. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah". Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suripto. 2012. "Analisis Perlakuan Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada KJKS/BMT Di Kabupaten Pematang". Pematang : Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.
- Sutan Remy, Syahdeni. 1999. "Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia". Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.



Wajdi Dusuki, Asyraf. 2015. "Sistem Keuangan Islam : Prinsip dan Operasi". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wardi, Jeni & Eka Putri, Gusmarila. 2011. "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102, Dan 105". Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011: 447-455

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.iaiglobal.or.id>

<http://www.koperasi.net>

<https://teorionline.wordpress.com>

